



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
KPKNL Ambon  
**2025**

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Ambon pada tahun 2025 dengan baik.

Laporan Kinerja KPKNL Ambon disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Ambon di tahun 2025 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Ambon memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum sebagian besar target kinerja KPKNL Ambon pada tahun anggaran 2025 dapat tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja KPKNL Ambon cukup berhasil. Keberhasilan KPKNL Ambon tergambar dalam kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2025. Target IKU yang tercapai/terlampau dengan capaian HIJAU sebanyak 17 IKU dan hanya 1 IKU dengan capaian KUNING.

Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2025 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan wujud transparansi serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran pada KPKNL Ambon pada tahun anggaran 2025.

Ambon, 18 Februari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik

Catur Setiono

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Di samping itu, LAKIN KPKNL Ambon 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Ambon sebagai upaya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kantor KPKNL Ambon.

Visi KPKNL Ambon adalah “*menjadi Kantor Pelayanan DJKN terdepan dalam mendukung visi DJKN Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Ambon menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara;
2. mengamankan Kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah Pengelolaan Kekayaan Negara;
4. menghasilkan nilai Kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Peta strategi KPKNL Ambon tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu, *Stakeholder*, *Customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari 8 (Delapan) sasaran Strategis. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya; Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
2. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa; Penerapan tata kelola aset yang efektif;
3. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif; Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif;
4. Penangan Hukum dan Komunikasi publik yang efektif; dan
5. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi, maka ditetapkan ikhtisar mengenai rencana kegiatan satu tahun anggaran yang termuat dalam Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja KPKNL Ambon tertuang dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Ambon, yang merupakan turunan dari Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.



Secara umum, pencapaian IKU KPKNL Ambon pada tahun 2025 sudah sesuai target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **116,84%**.

Upaya perbaikan terus dilakukan KPKNL Ambon untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi sehingga dapat terwujud organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*), adaptif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan (yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan).



# DAFTAR ISI

## Kata Pengantar

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kata Pengantar      | ii  |
| Ringkasan Eksekutif | iii |
| Daftar Isi          | v   |
| Daftar Tabel        | vi  |
| Daftar Gambar       | vii |

## Pendahuluan

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Latar Belakang                        | 1 |
| Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 1 |
| Sumber Daya Manusia                   | 4 |
| Sarana dan Prasarana                  | 6 |
| Peran Strategis                       | 7 |
| Sistematika Laporan                   | 8 |

## Rencana Kinerja

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Rencana Strategis            | 12 |
| Penetapan Kinerja Tahun 2025 | 16 |
| Pengukuran Kinerja           | 18 |
| Perjanjian Kinerja 2026      | 19 |

## Akuntabilitas Kinerja

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Capaian Kinerja Organisasi 2025 | 19 |
| Realisasi Anggaran              | 23 |

## Penutup

|         |    |
|---------|----|
| Penutup | 29 |
|---------|----|

# DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan .....           | 5  |
| Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural ..... | 5  |
| Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....         | 5  |
| Tabel 4 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional ..... | 6  |
| Tabel 5 Peta Stategi KPKNL Ambon .....                    | 16 |
| Tabel 6 Perjanjian Kinerja 2026 .....                     | 18 |
| Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Ambon 2025 ..... | 19 |
| Tabel 8 Realisasi Anggaran KPKNL Ambon .....              | 23 |



# DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Ambon 2025 .....            | 3  |
| Gambar 2 Data Capaian Keluaran dan Capaian Komponen .....      | 24 |
| Gambar 3 Data Bobot dan Capaian IKPA .....                     | 26 |
| Gambar 4 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan ..... | 27 |
| Gambar 5 Capaian IKU Triwulan I 2025.....                      | 28 |
| Gambar 6 Capaian IKU Triwulan II 2025.....                     | 28 |
| Gambar 7 Capaian IKU Triwulan III 2025.....                    | 28 |
| Gambar 8 Capaian IKU Triwulan IV 2025 .....                    | 28 |



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Peran Strategis
- F. Sistematika Penulisan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon beralamat di Gedung Keuangan Negara Ambon Lt. 4, Jalan Pattimura, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku adalah unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Ambon dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

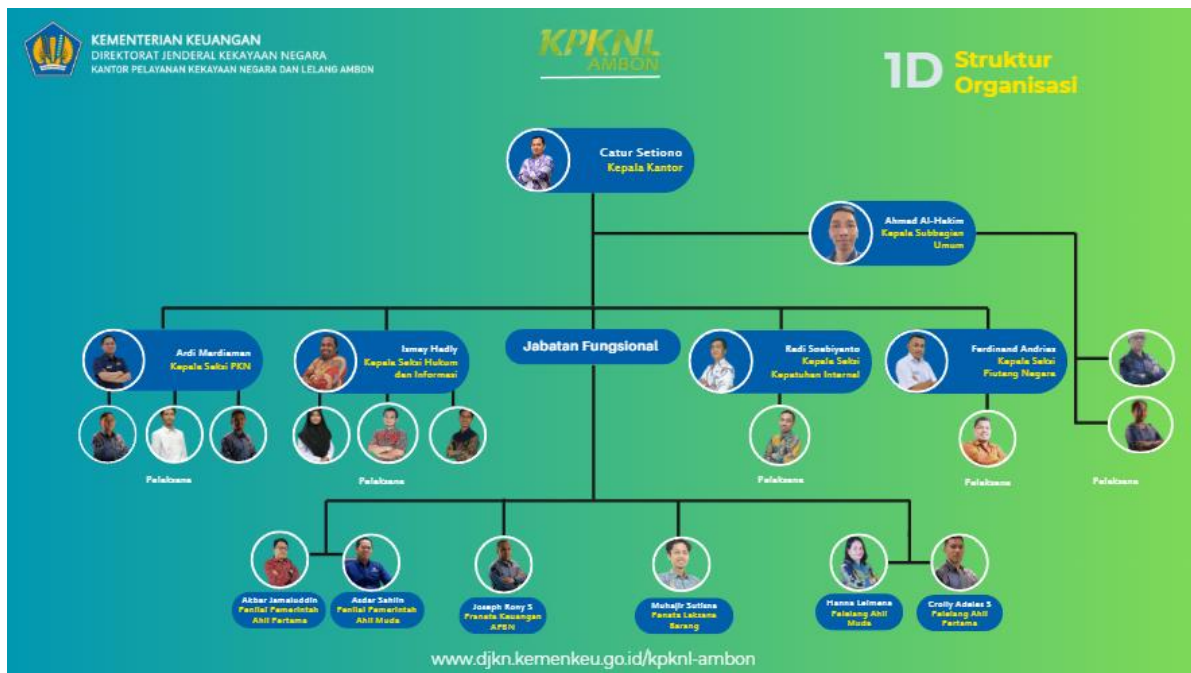
### **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 PMK 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon merupakan unit kerja yang berada di bawah lingkup pembinaan dan pengawasan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Struktur KPKNL Ambon terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural administrator (kepala kantor), jabatan pengawas, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik Negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, bimbingan teknis dan evaluasi, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik Negara/kekayaan Negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang Negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang Negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon saat ini dapat dilihat pada Bagan I.

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon



Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Ambon 2025

Penjelasan struktur organisasi KPKNL Ambon :

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), dengan 2 (dua) pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), dengan 1 (satu) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), dengan 2 (dua) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI), dengan 1 (satu) orang pelaksana; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPKNL Ambon berlokasi di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Kota Ambon, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten sebagai berikut:

1. Kota Ambon
2. Kota Tual
3. Kabupaten Maluku Barat Daya
4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar (dh. Kabupaten Maluku Tenggara Barat)
5. Kabupaten Kepulauan Aru

6. Kabupaten Maluku Tenggara
7. Kabupaten Maluku Tengah
8. Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Kabupaten Seram Bagian Timur
10. Kabupaten Buru Selatan
11. Kabupaten Buru

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan Negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang.
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang.
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan.
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang.
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang.
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

### **C. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon. Per tanggal 31 Desember 2025, jumlah pegawai pada KPKNL Ambon sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Total orang |
|----|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | I        | -         | -         | -           |
| 2  | II       | 3         | 1         | 4           |
| 3  | III      | 14        | 2         | 16          |
| 4  | IV       | 2         | -         | 2           |

Tabel 1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

2. Berdasarkan Jabatan Struktural

| No           | Unit Kerja                        | Jml       | Eselon   |          |          |           |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|              |                                   | Peg       | II       | III      | IV       | Pelaksana |
| 1            | Kepala Kantor                     | 1         | -        | 1        | -        | -         |
| 2            | Subbagian Umum                    | 3         | -        | -        | 1        | 2         |
| 3            | Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | 4         | -        | -        | 1        | 3         |
| 4            | Seksi Piutang Negara              | 2         | -        | -        | 1        | 1         |
| 5            | Seksi Hukum dan Informasi         | 4         | -        | -        | 1        | 3         |
| 6            | Seksi Kepatuhan Internal          | 2         | -        | -        | 1        | 1         |
| 7            | Kelompok Jabatan Fungsional       | 6         | -        | -        | -        | -         |
| <b>Total</b> |                                   | <b>22</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>10</b> |

Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

3. Berdasarkan Pendidikan

| No           | Unit Kerja | Jml       | Golongan |          |           |          |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
|              |            | Peg       | I        | II       | III       | IV       |
| 1            | SLTA       | 1         | 0        | 0        | 1         | 0        |
| 2            | D I        | 1         | 0        | 1        | 0         | 0        |
| 3            | D III      | 4         | 0        | 4        | 0         | 0        |
| 4            | D IV / S1  | 11        | 0        | 0        | 11        | 0        |
| 5            | S2         | 5         | 0        | 0        | 3         | 2        |
| 6            | S3         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> |            | <b>22</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>15</b> | <b>2</b> |

Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional

| No           | Jabatan Fungsional             | Jumlah   |
|--------------|--------------------------------|----------|
| 1            | Pelelang/Pejabat Lelang        | 2        |
| 2            | Penilai Kekayaan Negara        | 2        |
| 3            | Pranata Keuangan APBN Terampil | 1        |
| 4            | Penata Laksana Barang Mahir    | 1        |
| <b>Total</b> |                                | <b>6</b> |

Tabel 4 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

#### D. SARANA DAN PRASARANA

Ruang kerja KPKNL Ambon berada pada lantai 4 Gedung Keuangan Negara Ambon, yang digunakan sejak tahun 1995 dengan luas ruang kantor 1.572 m<sup>2</sup> dan pembagian ruang kerja sebagai berikut: ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu, ruang Kepala KPKNL, ruang kerja terbuka untuk Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan Pelaksana, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Bendahara Penerimaan, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Sekretariat, ruang Server, ruang BKPN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang Arsip dan ruang dapur (*Pantry*) serta kamar mandi/toilet.

Disamping itu, KPKNL Ambon telah memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa:

1. Kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 (satu) unit.
2. Kendaraan operasional sebanyak 4 (empat) unit roda empat dan 4 (empat) unit sepeda motor.
3. Komputer (PC) sebanyak 23 unit (16 Rusak Berat, 7 Rusak Ringan), Laptop 26 unit (12 Rusak Berat, 14 Baik), Tablet PC 1 unit (Rusak Ringan), Scanner 7 unit (4 Rusak Berat, 2 Rusak Ringan, 1 Baik) dan printer sebanyak 28 unit (16 Rusak Berat, 5 Rusak Ringan, 7 Baik).
4. Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 8 (delapan) unit yang berdiri diatas dua bidang tanah KPKNL Ambon, yang berstatus Hak Pakai. Rumah dinas tersebut terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Dinas Jabatan untuk Kepala Kantor ukuran 70 m<sup>2</sup> dan 7 (tujuh) unit Rumah Dinas untuk pejabat pengawas dan fungsional muda dengan ukuran masing-masing 50 m<sup>2</sup>.

#### E. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi DJKN di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang, KPKNL

Ambon memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis KPKNL Ambon di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna kekayaan Negara yang difokuskan pada utilisasi kekayaan Negara, pengamanan kekayaan Negara. Selain itu KPKNL Ambon juga memiliki tugas melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau HBU).

2. Memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Ambon di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* (NPL) menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan pelayanan Lelang

KPKNL Ambon berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus, baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, sehingga lelang menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu terobosan untuk ikut serta dalam menggerakkan perekonomian, terutama pemulihan likuiditas pada kredit macet perbankan.


4. Berkontribusi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Ambon memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon memperoleh hasil bea lelang termasuk bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Ambon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.
2. **Bab I. Pendahuluan**, Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis dan sistematika laporan.
3. **Bab II. Rencana Kinerja**, bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.
4. **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja.
5. **Bab IV. Penutup**, Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2025
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

## **BAB II RENCANA KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengukuran kinerja 2025–2029, DJKN telah menyusun Rencana Strategis 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, serta indikator kinerja kunci sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dokumen ini juga menegaskan dukungan DJKN terhadap Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029. DJKN diamanatkan untuk berkontribusi secara langsung pada tujuan Kemenkeu sebagai berikut:

1. Tujuan nomor 4, yaitu perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik; dan
2. Tujuan nomor 5, yaitu pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Selain itu, DJKN juga diharapkan dapat mendukung tujuan Kemenkeu sebagai berikut:

1. Tujuan nomor 2, yaitu pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; dan
2. Tujuan nomor 3, yaitu pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan mandat tersebut, DJKN menekankan profesionalisme, akuntabilitas, produktivitas, dan inovasi melalui transformasi regulasi, proses bisnis, dan layanan berbasis data/teknologi (termasuk integrasi sistem dan pemanfaatan data analitik & AI) agar berdampak ekonomi-sosial sekaligus memperkuat penegakan hukum dan tata kelola aset negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan Visi DJKN, yaitu “*Menjadi pengelola*

*kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”*

## **1. Misi**

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi yaitu:

- a. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- b. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
- c. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
- b. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
- c. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
- d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- b. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
- c. Layanan lelang yang modern dan tepercaya.

d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

## **2. Kebijakan dan Program Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

### **a. Kebijakan**

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) peningkatan kualitas pelayanan pengurusan Piutang Negara
- 2) peningkatan pengelolaan barang jaminan
- 3) peningkatan kualitas Pelayanan Lelang
- 4) peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan Piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
- 5) optimalisasi Barang milik Negara
- 6) penilaian Kekayaan Negara
- 7) peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Ambon;
- 8) melaksanakan cara kerja *New Normal* dalam melaksanakan tugas (rapat daring, WFO, WFH, dan WFHB).

### **b. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Ambon diuraikan dalam program sebagai berikut:

- 1) percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) pengaman barang jaminan;
- 3) percepatan pelayanan Lelang;
- 4) mengoptimalkan sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang, dan Lelang;
- 5) mengoptimalkan upaya penyelesaian Perkara;
- 6) pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 7) tertib administrasi BMN;
- 8) optimalisasi utilisasi kekayaan Negara; dan
- 9) penilaian BMN.

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Ambon harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut, dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Ambon Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Ambon tersebut di atas.

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target 2025                  |
|-----|---|--|------------------------------|
|     |   |  | Target                       |
| 1   | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | Tingkat Pemenuhan Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan                 | 100%                         |
|     |   | Indeks Integritas  | 100                          |
|     |   | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100%<br>(Rp 17.718.657.000 ) |
| 2   | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal                           | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara                                       | 100%                         |
|     |   | Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 100%<br>(Rp 221.690.000.000) |
|     |   | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara                          | 100%<br>(Rp 421.000.000)     |
| 3   | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa    | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi  | 74                           |

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target 2025      |
|-----|--|--|------------------|
|     |  |  | Kuantitas/Output |
| 4   | Penerapan tata kelola aset yang efektif  | Persentase Barang Milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100%             |
|     |  | Persentase evaluasi kinerja BMN                                  | 100%             |
| 5   | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara          | 100%             |
|     |  | Tingkat kualitas layanan penilaian                               | 70%              |
|     |  | Persentase produktivitas lelang                                  | 80%              |
| 6   | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif            | Indeks kualitas kinerja anggaran                                 | 100              |
|     |  | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa                     | 100              |
|     |  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                       | 80%              |
| 7   | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif                            | Indeks penanganan permasalahan hukum                             | 100              |
|     |  | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)               | 80               |
| 8   | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif      | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko                     | 80               |

Tabel 5 Peta Strategi KPKNL Ambon

### C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2025, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3. Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
  - a. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
    - 1) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
    - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).
    - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta, dan IKU non cascading dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
  - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
    - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
    - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%.
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan

- ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize* Indeks Capaian =  $[1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$  IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.
  3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize* Indeks Capaian =  $I_n = I_{n-1} + (I_{n+1} - I_{n-1}) / (C_{n+1} - C_{n-1}) \times (C_n - C_{n-1})$

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), arah kebijakan prioritas nasional, serta Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/RKA) Tahun 2026.

| No. | Sasaran Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target            |
|-----|--|--|-------------------|
| 1   | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel             | 1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan   | 100               |
|     |  | 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100%<br>(Rp15M)   |
| 2   | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan  | 2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah                                  | 100%              |
|     |  | 2b-N Tingkat efektivitas pembinaan   | 80%               |
| 3   | Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif                    | 3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara                          | 100%<br>(Rp446t)  |
|     |  | 3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang  | 100%<br>(Rp32,6M) |
| 4   | Penerapan tata kelola aset yang efektif  | 4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara                                       | 100%              |
|     |  | 4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan                   | 100%              |
|     |  | 4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN   | 100%              |
| 5   | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara                            | 100%              |
|     |  | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian   | 80%               |
|     |  | 5c-CP Persentase produktivitas lelang  | 85%               |
| 6   | Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif  | 6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai  | 100%              |
|     |  | 6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran  | 100               |
|     |  | 6c-N Indeks pengelolaan kearsipan  | 80                |
| 7   | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif                            | 7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik   | 80                |
|     |  | 7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum   | 80                |
| 8   | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif      | 8a-N Indeks integritas organisasi  | 100               |
|     |  | 8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko  | 83                |

Tabel 6 Perjanjian Kinerja 2026

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi 2025

B. Realisasi Anggaran

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2025

| No.          | Nama IKU   | NKO            | WARNA        | Penanggung Jawab  |
|--------------|--|----------------|--------------|---|
| 1            | Tingkat Pemenuhan Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan                 | 120,00%        | hijau        | PKN, PN, JF Pelelang, JF Penilai, Subbag Umum, Seksi HI, dan Seksi KI |
| 2            | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 120,00%        | hijau        | Seksi PKN, Seksi PN, JF Pelelang                                      |
| 3            | Indeks Integritas  | 105,32%        | hijau        | Seksi KI  |
| 4            | Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara                                       | 120,00%        | hijau        | Seksi PKN   |
| 5            | Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 95,24%         | kuning       | JF Pelelang   |
| 6            | Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara                                    | 120,00%        | hijau        | Seksi PN  |
| 7            | Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi  | 120,00%        | hijau        | JF Pelelang, Seksi PN   |
| 8            | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan                                   | 117,43%        | hijau        | Seksi PKN   |
| 9            | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)                                  | 120,00%        | hijau        | Seksi PKN   |
| 10           | Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara                      | 120,00%        | hijau        | Seksi PN  |
| 11           | Tingkat Kualitas Layanan Penilaian   | 120,00%        | hijau        | JF Penilai  |
| 12           | Persentase Produktivitas Lelang  | 120,00%        | hijau        | JF Pelelang   |
| 13           | Indeks Kualitas Kinerja Anggaran   | 120,00%        | hijau        | JFK APK APBN, Subbag Umum   |
| 14           | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                       | 120,00%        | hijau        | Subbag Umum   |
| 15           | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai   | 120,00%        | hijau        | Subbag Umum   |
| 16           | Indeks Penanganan Permasalahan Hukum   | 113,55%        | hijau        | Seksi HI  |
| 17           | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)                                 | 120,00%        | hijau        | Seksi HI  |
| 18           | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko                                       | 119,42%        | hijau        | Subbag Umum, Seksi KI   |
| <b>Total</b> |  | <b>116,84%</b> | <b>hijau</b> |   |

Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Ambon 2025

Dari hasil pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three KPKNL Ambon tahun 2025 sebagaimana diatas, maka untuk evaluasi dan analisis kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

## **SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya**

---

1. Tingkat Pemenuhan Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan 120,00%
  2. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 121,58%
  3. Indeks Integritas 105,32%
- 

Realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2025 sebesar Rp21.541.571.559.00 atau sebesar 121,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 17.718.657.000,00.

## **SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

---

1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara 120,00%
  2. Persentase Realisasi Pokok Lelang 95,24%
  3. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 120,00%
- 

IKU dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal tersebut, semuanya dapat tercapai karena pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada Satuan Kerja yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

## **SS 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa**

---

1. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 120,00%
- 

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi menunjukkan capaian sebesar 120,00% yang mencerminkan bahwa pelayanan kekayaan negara dan lelang telah memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai layanan kekayaan negara dan lelang, sehingga meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan layanan oleh pengguna jasa.

#### **SS 4 : Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif**

1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan 117,43%.
2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 120,00%

Tahun 2025 IKU dari Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan realisasi:

- a. Pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPKNL Ambon, Kanwil BPN Maluku serta Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. Segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh KPKNL Ambon

#### **SS 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif**

1. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 120,00%
2. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian 120,00%
3. Persentase Produktivitas Lelang 120,00%

IKU dari Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan koordinasi yang intensif dengan *stakeholder*.

#### **SS 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif**

1. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran 120,00%
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 120,00%
3. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 120,00%

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan berkualitas, tata kelola pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan dan akuntabel, serta pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan secara optimal dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan komitmen organisasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan organisasi.

### **SS 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif**

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum 113,55%
2. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) 120,00%

Capaian tersebut menggambarkan bahwa penanganan permasalahan hukum telah dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu, serta pengelolaan layanan informasi publik berjalan optimal sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan peningkatan kualitas penanganan hukum dan komunikasi publik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

### **SS 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif**

1. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 119.42%.

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko mencapai 119.42%. Capaian ini menggambarkan bahwa penerapan pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi serta meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Capaian yang diraih oleh KPKNL Ambon dalam waktu 5 tahun terakhir mengalami naik turun. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor umum yaitu:

1. Adanya pandemi Covid-19 membuat capaian pada 2020 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbaikan seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kerja keras KPKNL Ambon dan para *stakeholder*, dan
2. Indikator Kinerja Utama yang setiap tahun selalu mengalami pembaruan dan lebih menantang sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam proses pencapaiannya.

Meskipun dengan berbagai hambatan dalam mencapai target kinerja, seluruh jajaran KPKNL Ambon dapat

memberikan kinerja terbaiknya sehingga mendapatkan capaian akhir yang maksimal.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, KPKNL Ambon mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp2.996.575.000,00 yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.949.063.000,00 serta belanja modal sebesar Rp1.047.512.000,00. Namun dalam perkembangannya terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp558.716.000,00 sehingga pagu DIPA KPKNL Ambon menjadi sebesar Rp2.437.859.000,00. Adapun realisasi anggaran KPKNL Ambon tahun 2025 sebesar Rp2.322.614.041,00 yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.576.668.871,00 dan belanja modal sebesar Rp745.925.170,00.

| Jenis Belanja          | Pagu Awal              | Pagu Setelah Blokir    | Realisasi              | Persentase |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Belanja Pegawai        | 0                      | 0                      | 0                      | 0%         |
| Belanja Modal          | Rp1.047.512.000        | Rp759.011.000          | Rp745.925.170          | 98%        |
| Belanja Barang         | Rp1.949.063.000        | Rp1.678.848.000        | Rp1.576.668.871        | 94%        |
| <b>Jumlah Anggaran</b> | <b>Rp2.996.575.000</b> | <b>Rp2.437.859.000</b> | <b>Rp2.322.614.041</b> | <b>95%</b> |

Tabel 8 Realisasi Anggaran KPKNL Ambon

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Indikator Kinerja, dilakukan kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Data Capaian Keluaran Dan Capaian Komponen



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

#### DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

| No. | Satker | Nama Satker                                       | KPPN | Bulan | Program | Kegiatan | KRO | RO  | Uraian RO  | Pagu       | Realisasi  | Full Blokir | Target | Satuan                | Realisasi RO | Persentase | Status Konfirmasi | Status Validasi | Jenis RO | Cara Pelaporan | Polarisasi Capaian | Polarisasi Waktu | Target RWRO | Target PCRO | Nilai |
|-----|--------|---|------|-------|---------|----------|-----|-----|--|------------|------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 1   | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061  | 12    | CD      | 4798     | AAH | 001 | Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara     | 89.622.000 | 67.259.981 | P           | 50     | Surat/Keputusan       | 50           | 100        | terkonfirmasi     | DD - Data Valid | 2        | 1              | Maximize           | Time Efficiency  | 50          | 50          | 100   |
| 2   | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061  | 12    | CD      | 4798     | AAH | 002 | Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Putang Negara | 82.288.000 | 68.532.220 | P           | 7      | Surat/Keputusan       | 7            | 100        | terkonfirmasi     | DD - Data Valid | 2        | 1              | Maximize           | Stabilized       | 7           | 7           | 100   |
| 3   | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061  | 12    | CD      | 4798     | ABA | 002 | Rekomendasi Hasil Kajian Perilaku Ases               | 56.800.000 | 53.211.980 | P           | 551    | Rekomendasi/Kebijakan | 551          | 100        | terkonfirmasi     | DD - Data Valid | 2        | 1              | Maximize           | Stabilized       | 551         | 551         | 100   |
| 4   | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061  | 12    | CD      | 4798     | AEF | 001 | Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara              | 18.773.000 | 2.449.000  | P           | 2      | orang                 | 2            | 100        | terkonfirmasi     | DD - Data Valid | 2        | 1              | Maximize           | Stabilized       | 2           | 2           | 100   |
| 5   | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061  | 12    | CD      | 4798     | AEF | 002 | Sosialisasi Pengelolaan Putang Negara                | 5.978.000  | 427.500    | P           | 2      | orang                 | 2            | 100        | terkonfirmasi     | DD - Data Valid | 2        | 1              | Maximize           | Stabilized       | 2           | 2           | 100   |
| 6   | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061  | 12    | CD      | 4798     | AEF | 003 | Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang                 | 3.317.000  | 0          | P           | 1      | orang                 | 1            | 100        | terkonfirmasi     | DD - Data Valid | 2        | 1              | Maximize           | Stabilized       | 1           | 1           | 100   |
| 7   | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061  | 12    | CD      | 4798     | BAH | 001 | Risalah Lelang                                       | 22.332.000 | 21.930.800 | N           | 100    | dokumen               | 100          | 100        | terkonfirmasi     | DD - Data Valid | 2        | 1              | Maximize           | Time Efficiency  | 100         | 100         | 100   |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

|    |        |   |     |    |    |      |     |     |   |             |             |   |     |             |     |     |               |                 |   |   |          |                 |     |     |     |
|----|--------|---|-----|----|----|------|-----|-----|---|-------------|-------------|---|-----|-------------|-----|-----|---------------|-----------------|---|---|----------|-----------------|-----|-----|-----|
| 8  | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | CD | 4798 | FAE | 004 | Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara             | 23,612,000  | 22,744,371  | N | 2   | Rekomendasi | 2   | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Time Efficiency | 2   | 2   | 100 |
| 9  | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | CD | 4798 | FAE | 005 | Rekomendasi Hasil Penilaian                       | 48,204,000  | 35,940,280  | N | 2   | Rekomendasi | 2   | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Stabilized      | 2   | 2   | 100 |
| 10 | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | CD | 4798 | FAE | 007 | Penggalan Potensi Lelang                          | 31,995,000  | 12,802,300  | P | 2   | Rekomendasi | 2   | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Time Efficiency | 2   | 2   | 100 |
| 11 | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | CD | 4798 | UAE | 201 | Rekomendasi BMN Sesuai Tanah yang Diwariskan (PN) | 28,359,000  | 23,622,228  | P | 386 | Rekomendasi | 386 | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Time Efficiency | 386 | 386 | 100 |
| 12 | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4702 | BMB | 001 | Peminasan/Edukasi Publik                          | 10,200,000  | 0           | Y | 34  | Orang       | 34  | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Stabilized      | 34  | 34  | 100 |
| 13 | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4702 | SMR | 002 | Kahumasan   | 41,368,000  | 20,418,204  | P | 2   | kegiatan    | 2   | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Stabilized      | 2   | 2   | 100 |
| 14 | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4701 | EBA | 002 | Kerumahtanggaan                                   | 203,391,000 | 164,618,651 | P | 12  | Layanan     | 12  | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 1 | 2 | Maximize | Stabilized      | 12  | 12  | 100 |
| 15 | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4700 | EBA | 969 | Layanan Bantuan Hukum                             | 15,049,000  | 14,502,170  | N | 5   | Layanan     | 5   | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Stabilized      | 5   | 5   | 100 |

hal : 2 dari 3 halaman

tanggal cetak : 23-01-26 06:02:45 oleh : 538044



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

|                           |        |   |     |    |    |      |     |     |                                 |               |               |   |    |         |    |     |               |                 |   |   |          |                 |           |    |     |
|---------------------------|--------|---|-----|----|----|------|-----|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---|----|---------|----|-----|---------------|-----------------|---|---|----------|-----------------|-----------|----|-----|
| 16                        | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4701 | EBA | 994 | Layanan Perkantoran             | 1,205,563,000 | 1,044,976,976 | P | 12 | Layanan | 12 | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 1 | 2 | Maximize | Stabilized      | 12        | 12 | 100 |
| 17                        | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4701 | EBB | 001 | Peralatan Fasilitas Perkantoran | 705,522,000   | 415,525,170   | P | 50 | Unit    | 50 | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 1 | 1 | Maximize | Time Efficiency | 50        | 50 | 100 |
| 18                        | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4701 | EBB | 003 | Kendaraan Bermotor              | 341,990,000   | 330,400,000   | N | 1  | Unit    | 1  | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 1 | 1 | Maximize | Time Efficiency | 1         | 1  | 100 |
| 19                        | 538044 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 061 | 12 | WA | 4704 | EBD | 001 | Rekomendasi Kepatuhan Internal  | 62,012,000    | 23,452,210    | P | 5  | Dokumen | 5  | 100 | terkonfirmasi | 00 - Data Valid | 2 | 1 | Maximize | Stabilized      | 5         | 5  | 100 |
| Total Nilai Jumlah Output |        |   |     |    |    |      |     |     |                                 |               |               |   |    |         |    |     |               |                 |   |   |          |                 | 1,900,000 | 10 |     |

hal : 3 dari 3 halaman

tanggal cetak : 23-01-26 06:02:45 oleh : 538044

Gambar 2 Data Capaian Keluaran dan Capaian Komponen

**2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021**

Data Bobot dan Capaian IKPA

| No. | Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja                                      | NK Perencanaan Anggaran | Efektivitas | Efisiensi      |               |
|-----|-------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|---------------|
|     |                   |   |                         | Capaian RO  | Penggunaan SBK | Efisiensi SBK |
| 1   | 015.09.538044     | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | 94,25                   | 100,00      | 80,00          | 75,00         |

Gambar 3 Data Bobot dan Capaian IKPA

### 3. Konsistensi Rencana Penarikan Dana

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan  
Tahun Anggaran 2025  
Nomor : DIPA-015.09.2.538044/2025  
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara

Provinsi : (21) MALUKU

Kode/Nama Satker : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE           | URAIAN SATKER   | RENCANA PENARIKAN |          |         |         |         |         |         |         |           |         |          |           | JUMLAH SELURUH |
|----|----------------|---|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|----------------|
|    |                |   | JANUARI           | FEBRUARI | MARET   | APRIL   | MEI     | JUNI    | JULI    | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER  |                |
| 1  | 2              | 3   | 4                 | 5        | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12        | 13      | 14       | 15        | 16             |
| 1. | 538044         | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON         |                   |          |         |         |         |         |         |         |           |         |          |           |                |
|    |                | <b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>                             | 0                 | 77.053   | 89.639  | 72.771  | 171.468 | 122.296 | 96.890  | 92.435  | 167.369   | 499.410 | 272.952  | 1.334.293 | 2.996.575      |
|    |                | <b>BELANJA BARANG</b>                                     | 0                 | 77.053   | 89.639  | 72.771  | 171.468 | 122.296 | 96.890  | 92.435  | 167.369   | 169.010 | 272.952  | 617.181   | 1.949.063      |
|    |                | <b>BELANJA MODAL</b>                                      | 0                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 330.400 | 0        | 717.112   | 1.047.512      |
|    | 015.09.CD.4796 | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                    | 0                 | 1.210    | 0       | 0       | 450     | 195     | 0       | 789     | 0         | 1.500   | 0        | 23.924    | 28.068         |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                | 0                 | 1.210    | 0       | 0       | 450     | 195     | 0       | 789     | 0         | 1.500   | 0        | 23.924    | 28.068         |
|    | 015.09.CD.4798 | Pengelolaan Aset  | 0                 | 5.727    | 3.120   | 4.500   | 69.503  | 11.098  | 12.716  | 17.251  | 41.378    | 89.000  | 58.000   | 70.919    | 383.212        |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                | 0                 | 5.727    | 3.120   | 4.500   | 69.503  | 11.098  | 12.716  | 17.251  | 41.378    | 89.000  | 58.000   | 70.919    | 383.212        |
|    | 015.09.WA.4700 | Legislasi dan Litigasi                                    | 0                 | 2.568    | 1.390   | 0       | 480     | 600     | 1.560   | 766     | 1.055     | 3.000   | 2.500    | 1.130     | 15.049         |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                | 0                 | 2.568    | 1.390   | 0       | 480     | 600     | 1.560   | 766     | 1.055     | 3.000   | 2.500    | 1.130     | 15.049         |
|    | 015.09.WA.4701 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                       | 0                 | 67.549   | 84.889  | 68.271  | 94.030  | 109.187 | 82.374  | 66.652  | 112.758   | 405.910 | 200.452  | 1.164.395 | 2.456.466      |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                | 0                 | 67.549   | 84.889  | 68.271  | 94.030  | 109.187 | 82.374  | 66.652  | 112.758   | 75.510  | 200.452  | 447.283   | 1.408.954      |
|    | 015.09.WA.4702 | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik               | 0                 | 0        | 240     | 0       | 4.155   | 608     | 240     | 2.119   | 5.797     | 0       | 4.000    | 34.609    | 51.768         |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                | 0                 | 0        | 240     | 0       | 4.155   | 608     | 240     | 2.119   | 5.797     | 0       | 4.000    | 34.609    | 51.768         |
|    | 015.09.WA.4704 | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | 0                 | 0        | 0       | 0       | 2.850   | 608     | 0       | 4.858   | 6.380     | 0       | 8.000    | 39.316    | 62.012         |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA                                | 0                 | 0        | 0       | 0       | 2.850   | 608     | 0       | 4.858   | 6.380     | 0       | 8.000    | 39.316    | 62.012         |
|    |                | <b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>                               | 409.380           | 409.380  | 409.380 | 409.380 | 409.380 | 409.380 | 409.380 | 409.380 | 409.380   | 409.380 | 409.380  | 409.380   | 4.912.569      |

Gambar 4 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

#### 4. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

##### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                                     | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--|
|    |           |         |             |   |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |  |
| 1  | 061       | 015     | 538044      | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | Nilai       | 100.00                        | 100.00                   | 100.00                        | 0.00                | 0.00                 | 100.00                 | 100.00                              | 80.00       | 80%            | 0.00                       | 100.00                                   |
|    |           |         |             |   | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 0                   | 0                    | 10                     | 25                                  |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Akhir | 10.00                         | 15.00                    | 20.00                         | 0.00                | 0.00                 | 10.00                  | 25.00                               |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Aspek | 100.00                        |                          | 100.00                        |                     |                      |                        | 100.00                              |             |                |                            |  |

Gambar 5 Capaian IKU Triwulan I 2025

##### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                                     | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--|
|    |           |         |             |   |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |  |
| 1  | 061       | 015     | 538044      | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | Nilai       | 100.00                        | 93.64                    | 100.00                        | 0.00                | 0.00                 | 99.94                  | 100.00                              | 79.04       | 80%            | 0.00                       | 98.80                                    |
|    |           |         |             |   | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 0                   | 0                    | 10                     | 25                                  |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Akhir | 10.00                         | 14.05                    | 20.00                         | 0.00                | 0.00                 | 9.99                   | 25.00                               |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Aspek | 96.82                         |                          | 99.97                         |                     |                      |                        | 100.00                              |             |                |                            |  |

Gambar 6 Capaian IKU Triwulan II 2025

##### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                                     | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--|
|    |           |         |             |   |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |  |
| 1  | 061       | 015     | 538044      | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | Nilai       | 100.00                        | 100.00                   | 100.00                        | 100.00              | 0.00                 | 100.00                 | 100.00                              | 90.00       | 90%            | 0.00                       | 100.00                                   |
|    |           |         |             |   | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 10                  | 0                    | 10                     | 25                                  |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Akhir | 10.00                         | 15.00                    | 20.00                         | 10.00               | 0.00                 | 10.00                  | 25.00                               |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Aspek | 100.00                        |                          | 100.00                        |                     |                      |                        | 100.00                              |             |                |                            |  |

Gambar 7 Capaian IKU Triwulan III 2025

##### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER


| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                                     | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--|
|    |           |         |             |   |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |  |
| 1  | 061       | 015     | 538044      | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON | Nilai       | 100.00                        | 100.00                   | 100.00                        | 100.00              | 100.00               | 97.99                  | 100.00                              | 99.80       | 100%           | 0.00                       | 99.80                                    |
|    |           |         |             |   | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 10                  | 10                   | 10                     | 25                                  |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Akhir | 10.00                         | 15.00                    | 20.00                         | 10.00               | 10.00                | 9.80                   | 25.00                               |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Aspek | 100.00                        |                          | 99.50                         |                     |                      |                        | 100.00                              |             |                |                            |  |

Gambar 8 Capaian IKU Triwulan IV 2025



# 04.

## Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja KPKNL Ambon ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Ambon sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon ditetapkan berdasarkan peta strategis *Kemenkeu Three* yang terdiri dari 8 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana telah diuraikan pada BAB III, rata-rata pencapaian kinerja KPKNL Ambon (NKO) tahun 2025 adalah sebesar 116,84% dimana 17 IKU yang ditetapkan berwarna hijau dan 1 IKU berwarna kuning. Pencapaian NKO ini meningkat dibandingkan dengan NKO tahun 2024 (sebesar 115,27). Hal ini menunjukkan kualitas dan produktivitas kinerja KPKNL Ambon yang semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Ambon juga mengalami masalah/kendala sebagaimana telah diuraikan pada BAB I. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi agar KPKNL Ambon lebih cermat lagi dalam melakukan identifikasi potensi risiko yang dihadapi sekaligus melakukan mitigasi risikonya sehingga dampaknya dapat diminimalkan dalam upaya pencapaian target-target KPKNL Ambon ke depannya.



# Lampiran





## PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-1/WKN.17/2025

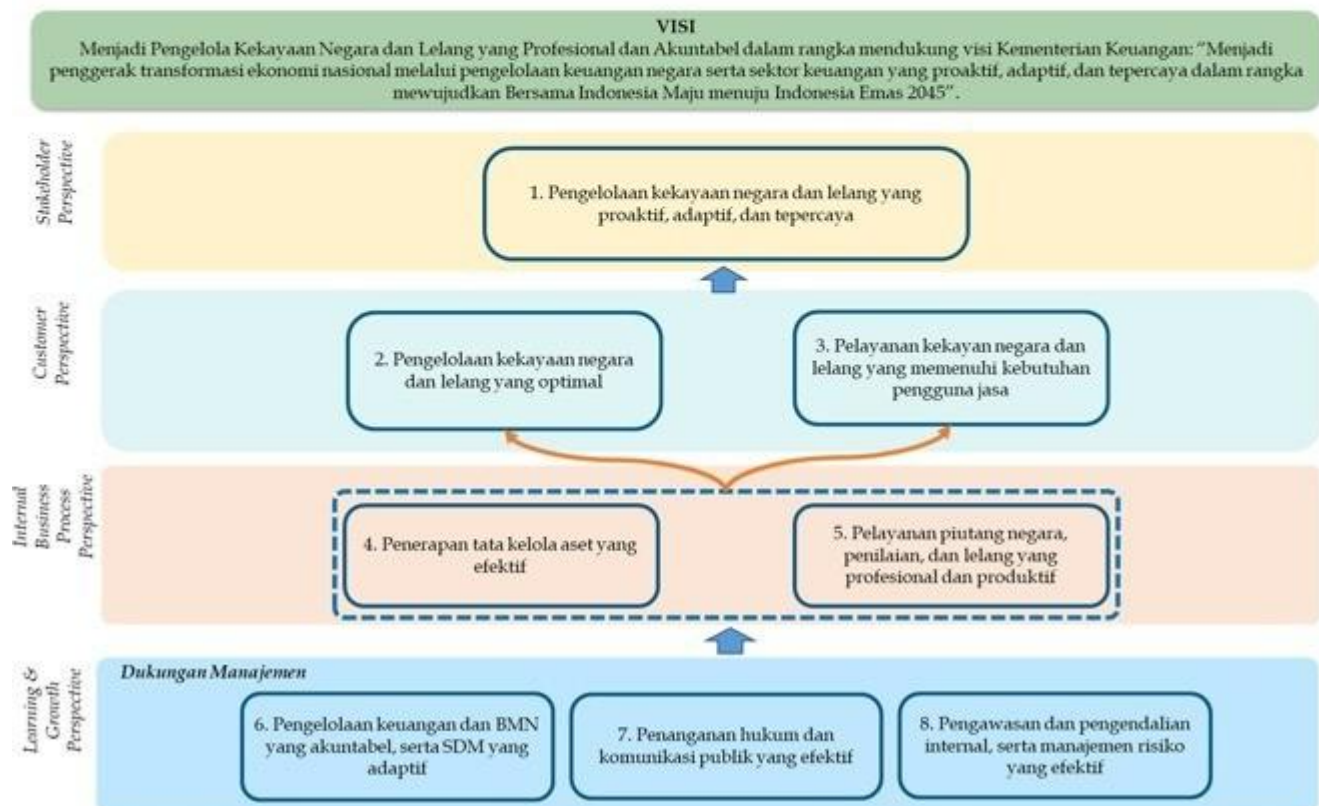
### KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

#### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**AMBON**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN**  
**KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target              |
|-----|---|--|---------------------|
| 1   | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | 1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan                                  | 100%                |
|     |   | 1b-CP Indeks integritas  | 100                 |
|     |   | 1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100%<br>(Rp17,7 M)  |
| 2   | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal                           | 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara                                       | 100%                |
|     |   | 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang  | 100%<br>(Rp221,6 M) |
|     |   | 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara                          | 100%<br>(Rp421 Jt)  |
| 3   | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa    | 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi  | 74                  |
| 4   | Penerapan tata kelola aset yang efektif                                       | 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan                   | 100%                |
|     |   | 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN  | 100%                |
| 5   | Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara                            | 100%                |
|     |   | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian   | 70%                 |
|     |   | 5c-CP Persentase produktivitas lelang  | 80%                 |
| 6   | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif           | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran   | 100                 |
|     |   | 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa  | 100                 |
|     |   | 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai  | 80%                 |
| 7   | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif                           | 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum   | 100                 |
|     |   | 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)                                  | 80                  |
| 8   | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif     | 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko  | 80                  |

| Program/Kegiatan 2025   | Anggaran               |
|---|------------------------|
| <b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b> | <b>Rp478,549,000</b>   |
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                             | Rp28,068,000           |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko                  | -                      |
| 3. Pengelolaan Aset   | Rp450,481,000          |
| 4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                              | -                      |
| 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara            | -                      |
| 6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif                    | -                      |
| <b>Dukungan Manajemen</b>   | <b>Rp1,935,034,000</b> |
| 1. Legislasi dan Litigasi   | Rp15,049,000           |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                                | Rp1,793,745,000        |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik                        | Rp51,768,000           |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM                                     | -                      |
| 5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal          | Rp74,472,000           |
| 6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi                         | -                      |

Kepala Kantor Wilayah Papua,  
Papua Barat dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik  
Kristijanindyati Puspitasari

Kota Ambon, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik  
Catur Setiono



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
AMBON  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

| Kode SS/IKU | SS / IKU   | Target |      |        |      |        |      |                    |
|-------------|--|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------|
|             |  | Q1     | Q2   | Smt. 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4   | Y                  |
| <b>1</b>    | <b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>  |        |      |        |      |        |      |                    |
| 1a-CP       | Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan                                    | 20%    | 50%  | 50%    | 70%  | 70%    | 100% | 100%               |
| 1b-CP       | Indeks integritas  | 100    | 100  | 100    | 100  | 100    | 100  | 100                |
| 1c-CP       | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang   | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%<br>(Rp17,7M)  |
| <b>2</b>    | <b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>                           |        |      |        |      |        |      |                    |
| 2a-CP       | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara   | 50%    | 60%  | 60%    | 80%  | 80%    | 100% | 100%               |
| 2b-CP       | Persentase realisasi pokok lelang  | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%<br>(Rp221,6M) |
| 2c-CP       | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara                            | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%<br>(Rp421 Jt) |
| <b>3</b>    | <b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>    |        |      |        |      |        |      |                    |
| 3a-CP       | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi  | 74     | 74   | 74     | 74   | 74     | 74   | 74                 |
| <b>4</b>    | <b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>                                       |        |      |        |      |        |      |                    |
| 4a-CP       | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan                     | 5%     | 40%  | 40%    | 60%  | 60%    | 100% | 100%               |
| 4b-CP       | Persentase evaluasi kinerja BMN  | 15%    | 50%  | 50%    | 75%  | 75%    | 100% | 100%               |
| <b>5</b>    | <b>Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif</b> |        |      |        |      |        |      |                    |
| 5a-CP       | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara                              | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100% | 100%               |
| 5b-CP       | Tingkat kualitas layanan penilaian   | 70%    | 70%  | 70%    | 70%  | 70%    | 70%  | 70%                |
| 5c-CP       | Persentase produktivitas lelang  | 30%    | 40%  | 40%    | 70%  | 70%    | 80%  | 80%                |
| <b>6</b>    | <b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>           |        |      |        |      |        |      |                    |

| Kode<br>SS/IKU | SS / IKU   | Target |     |        |     |        |     |     |
|----------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
|                |  | Q1     | Q2  | Smt. 1 | Q3  | s.d.Q3 | Q4  | Y   |
| 6a-CP          | Indeks kualitas kinerja anggaran   | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100 |
| 6b-N           | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa                                     | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100 |
| 6c-N           | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                       | 20%    | 40% | 40%    | 60% | 60%    | 80% | 80% |
| <b>7</b>       | <b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>                       |        |     |        |     |        |     |     |
| 7a-CP          | Indeks penanganan permasalahan hukum   | 100    | 100 | 100    | 100 | 100    | 100 | 100 |
| 7b-N           | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)                               | 80     | 80  | 80     | 80  | 80     | 80  | 80  |
| <b>8</b>       | <b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b> |        |     |        |     |        |     |     |
| 8a-N           | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko                                     | 80     | 80  | 80     | 80  | 80     | 80  | 80  |

Kota Ambon, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Ambon



Ditandatangani Secara Elektronik  
Catur Setiono



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN**  
**2025**

| No. | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory |          |        | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--------|---------------------|----------------|------------|----------|--------|---------------------|------------------|------------|
|     |        |                     |                | Waktu      | Kegiatan | Output |                     |                  |            |
|     |        |                     |                |            |          |        |                     |                  |            |

Kota Ambon, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon



Ditandatangani Secara Elektronik  
Catur Setiono



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

**BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI s.d. 31 DESEMBER TAHUN 2025**

| NO | PEGAWAI YANG DINILAI |  | NO | PEJABAT PENILAI KINERJA |  |
|----|----------------------|--|----|-------------------------|--|
| 1  | NAMA                 | Catur Setiono  | 1  | NAMA                    | Kristijanindyati Puspitasari   |
| 2  | NIP                  | 19820831 200412 1 001                                    | 2  | NIP                     | 19700729 199603 2 001  |
| 3  | PANGKAT/ GOL. RUANG  | Penata Tingkat I (III/d)                                 | 3  | PANGKAT/ GOL. RUANG     | Pembina Utama Muda (IV/c)  |
| 4  | JABATAN              | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon | 4  | JABATAN                 | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku |
| 5  | UNIT KERJA           | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon        | 5  | UNIT KERJA              | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku        |

**HASIL KERJA**

| NO  | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
|-----|---------------------|----------------------------|--------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                        | (4)    | (5)        |

**A. UTAMA**

|   |   |  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan                                  | 100%             | Penerima Layanan |
|   |   | Indeks integritas  | 100              | Penerima Layanan |
|   |   | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp17,7 M)  | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa               | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara                                       | 100%             | Penerima Layanan |
|   |   | Persentase realisasi pokok lelang  | 100% (Rp221,6 M) | Penerima Layanan |
|   |   | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara                          | 100% (Rp421 Jt)  | Penerima Layanan |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa    | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi  | 74               | Penerima Layanan |

| HASIL KERJA |   |  |        |                                  |
|-------------|---|--|--------|----------------------------------|
| NO          | RENCANA HASIL KERJA   | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU                                       | TARGET | PERSPEKTIF                       |
| (1)         | (2)   | (3)  | (4)    | (5)                              |
| 4           | Penerapan tata kelola aset yang efektif                                       | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100%   | Proses Bisnis                    |
|             |   | Persentase evaluasi kinerja BMN                                  | 100%   | Proses Bisnis                    |
| 5           | Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas                         | 100%   | Proses Bisnis                    |
|             |   | piutang negara   | 70%    | Proses Bisnis                    |
|             |   | Tingkat kualitas layanan penilaian                               | 80%    | Proses Bisnis                    |
| 6           | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif           | Indeks kualitas kinerja anggaran                                 | 100    | Penguatan Internal atau Anggaran |
|             |   | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa                     | 100    | Penguatan Internal atau Anggaran |
|             |   | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                       | 80%    | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 7           | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif                           | Indeks penanganan permasalahan hukum                             | 100    | Penguatan Internal atau Anggaran |
|             |   | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)               | 80     | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 8           | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif     | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko                     | 80     | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN |   |  |        |                                  |

| PERILAKU KERJA |  |  |
|----------------|--|--|
| 1              | Berorientasi pelayanan   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>     |
| 2              | Akuntabel  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>   |
| 3              | Kompeten   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4              | Harmonis   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>           |
| 5              | Loyal  |  |

PERILAKU KERJA

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>                                       |
| 6 | Adaptif   |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>                                      |
| 7 | Kolaboratif   |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Kristijanindyati Puspitasari  
19700729 199603 2 001

Kota Ambon, 31 Januari 2025  
Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Catur Setiono  
19820831 200412 1 001



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| DUKUNGAN SUMBER DAYA                            |  |        |      |       |      |        |      |                     |
|---|--|--------|------|-------|------|--------|------|---------------------|
| 1.  | 22 pegawai   |        |      |       |      |        |      |                     |
| 2.  | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> |        |      |       |      |        |      |                     |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN                        |  |        |      |       |      |        |      |                     |
| <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> |  |        |      |       |      |        |      |                     |
| No  | IKI  | Target |      |       |      |        |      |                     |
|   |  | Q1     | Q2   | Smt 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4   | Y                   |
| 1a-CP   | Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan  | 20%    | 50%  | 50%   | 70%  | 70%    | 100% | 100%                |
| 1b-CP   | Indeks integritas  | 100    | 100  | 100   | 100  | 100    | 100  | 100                 |
| 1c-CP   | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang                 | 100%   | 100% | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100%<br>(Rp17,7 M)  |
| 2a-CP   | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara   | 50%    | 60%  | 60%   | 80%  | 80%    | 100% | 100%                |
| 2b-CP   | Persentase realisasi pokok lelang  | 100%   | 100% | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100%<br>(Rp221,6 M) |
| 2c-CP   | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara  | 100%   | 100% | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100%<br>(Rp421 Jt)  |

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



|       |  |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi                        | 74   | 74   | 74   | 74   | 74   | 74   | 74   |
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5%   | 40%  | 40%  | 60%  | 60%  | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN                                  | 15%  | 50%  | 50%  | 75%  | 75%  | 100% | 100% |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian                               | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang                                  | 30%  | 40%  | 40%  | 70%  | 70%  | 80%  | 80%  |
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran                                 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 6b-N  | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 6c-N  | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                       | 20%  | 40%  | 40%  | 60%  | 60%  | 80%  | 80%  |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 7b-N  | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)               | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| 8a-N  | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko                     | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |

### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Kristijanindyati Puspitasari

19700729 199603 2 001

Kota Ambon, 31 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Catur Setiono

19820831 200412 1 001





**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA